



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang : 2018 - 2019.
Masa Persidangan ke : V (Lima).
Sifat Rapat : Terbuka.
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat.
Dengan : **Badan Ekonomi Kreatif RI.**
Hari/Tanggal : **Senin, 17 Juni 2019.**
Pukul : **14.00 WIB s/d selesai.**
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat : Dr, Ir, Djoko Udjianto, MM./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara : **1. Evaluasi dan Daya Serap APBN TA 2018**
2. Evaluasi dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2019
3. Pembahasan RKA K/L Tahun 2020.
4. Lain-lain
Hadir : 33 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah : Triawan Munaf/Kepala Bekraf RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul **14.30** WIB oleh **Dr. Ir. Djoko Udjianto, M.M./Ketua** Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Bekraf RI, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Daya Serap APBN TA 2018

1. Kepala Bekraf RI menyampaikan daya serap anggaran Bekraf RI TA 2018, yaitu:

- a. Menurut program sebesar 87,93 % dengan rincian sebagai berikut:

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	88,13 %
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	87,18 %

- b. Menurut jenis belanja sebagai berikut:

Belanja Pegawai	84,97 %
Belanja Barang	88,01 %
Belanja Modal	89,32 %

2. Selain daya serap anggaran, Kepala Bekraf RI juga menyampaikan proyeksi capaian Ekonomi Kreatif tahun 2018 dalam hal pertumbuhan PDB, penyerapan tenaga kerja, dan nilai ekspor produk, dengan rincian sebagai berikut:

Pertumbuhan PDB Ekraf	5,19 %
Penyerapan Tenaga Kerja	18,35 juta orang
Nilai Ekspor Produk Kreatif	20,6 miliar USD

B. Daya Serap Kwartal I APBN TA 2019

Kepala Bekraf RI menyampaikan daya serap anggaran Bekraf RI pada kwartal I TA 2019 sebesar Rp124.019.034.000 (*Seratus dua puluh empat miliar Sembilan belas juta tiga puluh empat ribu rupiah*) atau sebesar 18,87 % dari pagu Rp657.151.214.000, (*Enam ratus lima puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah*), dengan rincian sbb:

Program	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
Program Pengembangan Ekraf	504.282.532.000	87.870.684.000	17,42 %
Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	152.868.677.000	36.148.350.000	23,64 %

Adapun realisasi menurut jenis belanja sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
Belanja Pegawai	39.943.585.000	8.015.356.000	20,07 %
Belanja Barang	602.978.191.000	114.698.921.000	19,02 %
Belanja Modal	14.229.438.000	1.304.757.000	9,17 %

Berdasarkan daya serap tersebut, Bekraf RI juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran sebesar 124.019.034.000 (*Seratus dua puluh empat miliar Sembilan belas juta tiga puluh empat ribu rupiah*) atau sebesar 18,87 %, jika dibandingkan realisasi anggaran kwartal I dalam empat tahun terakhir, persentase realisasi kwartal I tahun 2019 lebih tinggi.

C. Pembahasan RKA-KL TA 2020

Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI menyampaikan antara lain:

- Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan RI Nomor S-338/MK.02/2019 dan Nomor B.241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2020 tanggal 29 April 2019, Bekraf RI mendapatkan pagu indikatif RAPBN TA 2020 sebesar **Rp870.461.172.000** (*Delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta serratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Program	Anggaran (Indikatif)
Program Pengembangan Ekraf	693.196.565.000
Program dukungan manajemen dan tugas	177.264.607.000

teknis lainnya	
----------------	--

Dengan rincian per unit utama sebagai berikut:

1.	Deputi Riset Edukasi dan Pengembangan	113.738.600.000
2.	Deputi Akses Permodalan	98.013.000.000
3.	Deputi Infrastruktur	157.532.700.000
4.	Deputi Pemasaran	135.916.465.000
5.	Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi	82.228.600.000
6.	Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah	105.767.200.000
7.	Sekretariat Utama	177.264.607.000

2. Pagu Indikatif Bekraf RI pada RAPBN TA 2020 sebesar **Rp870.461.172.000** (*Delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Pagu Indikatif Bekraf RI pada RAPBN TA 2019 sebesar **Rp706.167.673.000,-** (*Tujuh ratus enam milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
3. Bekraf RI telah menyampaikan arah kebijakan pada RAPBN TA 2020 sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan peran Indonesia di fora ekonomi kreatif global.
 - b. Membangun ekosistem usaha digital ekraf secara menyeluruh dan terintegrasi, melalui Manajemen Kolektif Digital Nasional.
 - c. Fasilitasi pelaku Ekraf yang dilaksanakan secara *Bottom Up* melalui proses yang transparan.
 - d. Membangun kebijakan ekosistem ekspor terintegrasi untuk produk ekraf yang dijual secara ritel ke pasar internasional.
 - e. Memperkenalkan karya kreatif unggulan Indonesia yang signifikan di fora internasional yang tepat.
 - f. Pengembangan ekosistem industri film nasional.
 - g. Menghadirkan ekosistem pembiayaan berbasis HKI.
 - h. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

D. Sikap dan pandangan Komisi X DPR RI

1. Komisi X DPR RI mendorong Bekraf RI untuk menyampaikan rincian daya serap anggaran per unit utama pada APBN TA 2018 dan kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran tersebut.
2. Komisi X DPR RI mendesak Bekraf RI untuk memberikan penjelasan dan data rinci mengenai capaian program serta kegiatan pada kwartal I APBN TA 2019. Selanjutnya, Komisi X DPR RI juga mengharapkan agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2018 dapat dipertahankan pada tahun 2019.
3. Komisi X DPR RI telah mengetahui bahwa Pagu Indikatif Bekraf RI pada RAPBN TA 2020 sebesar **Rp870.461.172.000** (*Delapan ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)

mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan pagu Indikatif Bekraf RI pada RAPBN TA 2019 sebesar **Rp706.167.673.000,-** (*Tujuh ratus enam milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*). Hal ini harus diikuti dengan proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan secara terukur, terkontrol dan komprehensif.

4. Dalam pembahasan RKP dan RKA Bekraf RI ke depan, Bekraf RI perlu:
 - a. menyajikan basis data yang digunakan, rujukan, target dan sasaran dalam penyusunan RKP dan RKA TA 2020, serta menyampaikan juga peta data ekonomi kreatif per-provinsi dan per-kabupaten/kota sampai tahun 2019, khususnya yang terkait dengan capaian program unggulan dan program prioritas.
 - b. Menyajikan review kendala, capaian program dan kegiatan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sebagai bahan rujukan penyusunan RKP dan RKA Bekraf RI tahun 2020.
5. Berdasarkan Pasal 227 ayat (3) UU MD3, Komisi X DPR RI meminta Bekraf RI untuk menyampaikan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan APBN TA 2019, untuk menjadi salah satu bahan rujukan pembahasan RKP dan RKA Bekraf RI TA 2020.
6. Komisi X DPR RI akan melakukan kajian dan pendalaman terhadap bahan yang disampaikan Bekraf RI hari ini, sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan RKP dan RKA Bekraf TA 2020, setelah dibacakan nota keuangan APBN TA 2020 oleh Presiden RI pada sidang Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2019.

E. Lain-Lain

1. Komisi X DPR RI dan Kepala Bekraf RI sepakat akan mengagendakan Pembahasan RKP-K/L dan RKA-K/L Tahun 2020 pada akhir Juni 2019 (*tentatif*), dengan agenda penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, organisasi, dan program kegiatan K/L sesuai hasil pembahasan Banggar pada Masa Sidang V Tahun 2018-2019.
2. Komisi X DPR RI meminta Bekraf RI untuk menyerahkan penjelasan atau jawaban atas seluruh pertanyaan, masukan dan tanggapan anggota Komisi X DPR RI secara tertulis paling lambat tanggal 26 Juni 2019.
3. Dalam pembahasan RUU tentang Ekonomi Kreatif, Komisi X DPR RI mengharapkan pemerintah agar lebih kooperatif dalam proses pembahasannya.

II. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.25 WIB